

**ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61
TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Oleh

Mei Ayu Zulfikriyah

NIM. 05020422039



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Ayu Zulfikriyah
NIM : 05020422039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2026

Yang menyatakan,



Mei Ayu Zulfikriyah

NIM. 05020422039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mei Ayu Zulfikriyah

NIM : 05020422039

Judul : Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026
Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Kofak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mei Ayu Zulfikriyah

NIM : 05020422039

Judul : Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Kementerian Negara

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



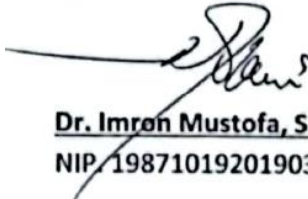
Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II



Dr. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 1 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mei Ayu Zulfikriyah
NIM : 05020422039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : meiayuzulfikriyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Kementerian Negara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Mei Ayu Zulfikriyah)

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menimbulkan dinamika dan perdebatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait penghapusan batas maksimal jumlah kementerian dan perluasan kewenangan Presiden dalam menentukan struktur kementerian. Perubahan tersebut dipandang memiliki implikasi terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pembentukan kebijakan publik juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab permasalahan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara dalam perspektif hukum positif serta tinjauannya dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach*, dan pendekatan sejarah *historical approach*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian norma, asas, dan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* terhadap materi muatan dan proses pembentukan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 masih menyisakan problematika, khususnya terkait optimalisasi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari aspek tata kelola pemerintahan, fleksibilitas kewenangan Presiden dalam membentuk kementerian berpotensi menimbulkan pembengkakan struktur birokrasi, inefisiensi anggaran, serta tumpang tindih kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan *'adl*, kemaslahatan *maṣlahah*, dan musyawarah *shūrā*, yang seharusnya menjadi landasan etis dalam pembentukan kebijakan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR lebih mengedepankan asas keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik yang substantif dalam setiap proses legislasi guna memperkuat legitimasi demokratis. Selain itu, diperlukan penyusunan aturan pelaksana yang memberikan pedoman dan pembatasan administratif terhadap penggunaan kewenangan Presiden dalam pembentukan kementerian, sehingga tetap berada dalam koridor efisiensi dan akuntabilitas. Penguatan prinsip *good governance* serta integrasi nilai-nilai *fiqh siyāsah* diharapkan mampu menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

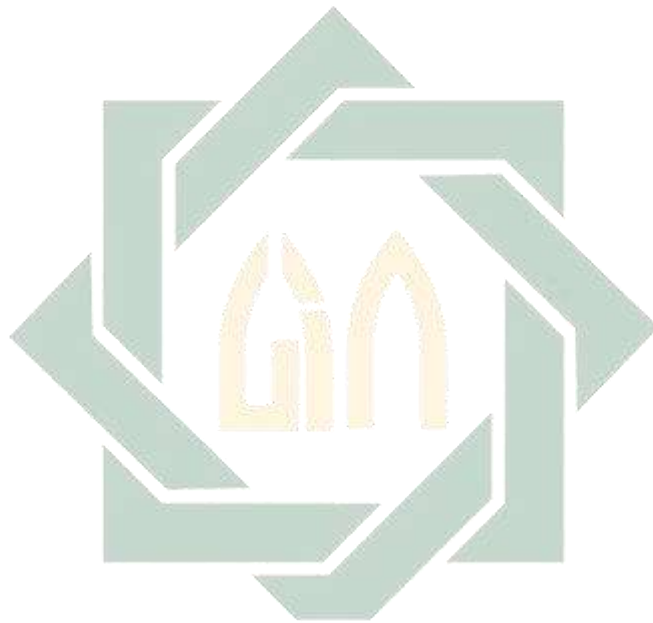
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional	20
I. Metode Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	33
A. Teori Legislasi	33
B. Teori Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	37
C. Teori Asas Keterbukaan.....	39
D. Teori <i>Good Governance</i>	41
E. Teori <i>Fiqh Siyāsah</i>	42
BAB III PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.....	45

A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara	45
B. Proses Legislasi Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024....	47
C. Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	54
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024.....	69
A. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	69
B. Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah dustūrīyah</i>	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	98
BIOGRAFI PENULIS	106

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jangka Waktu Pembentukan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Tahun 2024.....	50
Tabel 2. Kronologi Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara	64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Hikam, Sahrul. *Reformasi Legislasi Indonesia: Menuju Hukum yang Inklusif dan Berkeadilan*. 1st ed. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

Nurohim, Muhammad. *Buku Ajar Perancangan Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011*. 1st ed. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.

Sumber Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Address Akmaluddin, Muhammad. "Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Delegan (Delegated Legislation)." *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 8 (August 2024): 1132–38. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i08.1461>.

Adiputra, I. Ketut Agus Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 1 (2025): 55–61.

Aji, Ari Bakti Windi, Khatimul Fitri, and Norman. "Kedudukan Asas Hukum di Indonesia: Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 2 (2024): 96–110.

Al Fikri Ys, Irsyad, and Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (July 2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Alifah, Nur. "Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 35–47. <https://doi.org/10.71242/3n83rp30>.

Alsyan and Yunita Syofyan. "Model Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 835–46. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.423>.

Ardiansyah, M. Bagus. "Analisis Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

- Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (October 2022): 52. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Azimattara, Muchammad Daing, and Adinda Ari Wijayanti. “Sinergitas Prinsip Good Governance dan Kekuatan Negara: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Publik di Indonesia.” *Journal of Contemporary Law Studies* 3, no. 1 (2025): 149–60.
- Begovic, M. Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Lex Superior* 1, no. 1 (2022): 58–75.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2021): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chaidir Ali and Fatmawati. “Formal Constitutional Review Paradox: The Law on Legislation Making between Legal Procedure and Constitutional Norms.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 195–214.
- Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobowati. “Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 298–305.
- Efendi, Sumardi. “Prinsip Syuradalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam.” *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (August 2024): 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.
- Fitria Damayanti, Setyaning Wida N.A, and Endriyani Lestari. “Pemenuhan Asas Kebermanfaatan Hukum pada Permendag No. 31 Tahun 2023.” *Jurnal Legislatif* 7, no. 1 (2024): 17–31.
- Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Lisnawati. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah.” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20–31.
- Gusman, Delfina. “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 2024): 655–65. <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

- Hafizd, Mohammad. "Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin, and Tito Inouva Harada. "Siyasah Dusturiyyah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 2021): 60–68. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4895>.
- Hastuti, Noor Tri, Jundiani, Benyamin Tungga, and Joko Nur Sariono. "Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governace." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 445–60.
- Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.
- Irwansyah and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 55–65.
- Kafin Muhammad. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *JIL : Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (June 2023): 1–26. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1000>.
- Kirana Utami, Tanti, Nazwa St May, Siti Nurajijah, Helmi Al Zaidan, Farrel Meika Putra Hendrawan, and M. Algi Fahril. "Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (December 2024): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3421>.
- M. Arfan Ahwadzy. "Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 151–67.
- Maimun, Maimun, and Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of*

Constitutional Law 3, no. 1 (June 2023): 111–30.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

Maranjaya, Abdul Kahar. “Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan.” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2, no. 11 (2022): 929–41.

Mareta, Frisda Cahya and Firdaus. “Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 2 (March 2024): 231–40. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>.

Marhadila, Farisna, Fiki Putra Firdaus, Ismi Dewi Rahma Kadilla, and Putri Fatma Apriliani. “Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 1, no. 4 (2024): 811–23.

Mastorat. “Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (December 2020): 147–68. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>.

Maula, Bani Syarif. “Fiqh Siyasa in Indonesia’s Post-Colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices.” *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 4, no. 1 (2025): 51–66. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13610>.

Maulana, Muhammad Adrian, Fitri Nurhania Putri, and Fahmi Ali Ramdhani. “Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Proses Legislasi Nasional.” *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 367–72.

Mistam, and Fathul Maujud. “Prinsip-prinsip Pengawasan dalam Al-Qur’an dan Hadits: Implikasi terhadap Etika dan Kepemimpinan dalam Masyarakat Muslim.” *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (July 2025): 101–16. <https://doi.org/10.52593/pdg.06.2.06>.

Muhajirin and May Dedu. “Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 172–200.

Muhammad Rian Maulana, Nor Yelly, Cinta Nur Azizah, and Amara Azzahra. “Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosial.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1219–26.

Muhammad Taufiq Firdaus. “Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara.”

JAPHTN-HAN 4, no. 1 (2025): 45–64.
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>.

Muzakki, Muhammad Irfan. “Reformasi Pengaturan Jumlah Kementerian Di Indonesia (Studi Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025. <https://repository.uinsaizu.ac.id/33047/>.

Nasution, Mirza, Geofani Milthree Saragih, Sulastri, Mardhatillah Suaka, and Ade Sathya Sanathana Ishwara. “Reconstruction of Law-Making in Indonesia: A Review of Legal Effectiveness.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (September 2025): 226–42. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.10698>.

Nurussa’adah, Khalisatun, and Akhmad Zaki Yamani. “Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam.” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15, no. 1 (2025): 1–12.

Qomariah, Siti, and Mhd. Fakhruurrahman Arif. “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (2023): 53–63.

Ramadhan, Muhammad Ridha, and Mirza Satria Buana. “Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2397–405.

Ridho, Hilmi, Aizat Khairi, Abdul Mujib, and Sageer Ahmed. “Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (December 2024): 30–49. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.434>.

Rokilah and Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

Roziqin, Roziqin, and Ibnu Sofyhan. “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal De Jure* 15, no. 1 (2023): 33–45.

Sabil Mokodenseho, Retnawati Siregar, Shohib Muslim, Kalijunjung Hasibuan, and Rahman. “Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid Al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia.” *West Science Islamic Studies* 2, no. 01 (January 2024): 30–37. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590>.

- Saifuddin. “Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 1–35. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.
- Sari, Shinta, Ivan Yudianto, and Sri Mulyani. “Pengaruh Implementasi Good Government Governance pada Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia).” *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 11, no. 2 (2024): 427–41. <https://doi.org/10.30656/jak.v11i2.8748>.
- Sarkowy V. Zahry. “Politik Hukum dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.” *Journal Equitable* 8, no. 3 (2023): 425–48. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i3.6029>.
- Sintia Wahyu Pratiwi, Ferida Asih Wilujeng, and Jalu Sora Wicitra. “Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran.” *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025): 132–43.
- Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, and Muhammad Zamroni. “Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 161–76.
- Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (Desember 2018): 202–10.
- Sukhoyya, Ahmad Wildan. “Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara.” *KNAPHTN* 2, no. 1 (n.d.): 1–16.
- Sukria, Ramdan, Ratu Alivya Syahrazard Ramdhan, Risani Aghnia Nurhasanah, Mutiara Rizky, and Utang Rosidin. “Tinjauan Kritis terhadap Penerapan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025): 1–11.
- Syafdillah Sastri Syam, Nurfadillah Nurfadillah, and Kurniati Kurniati. “Analisis Etika Lembaga Legislatif Perspektif Fiqih Dusturiyah.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2024): 173–81. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1370>.
- Syahputra, Yusuf. “Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 5 (2025): 993–99.
- Syamsuar. “Legislative functionalization in Fiqh Siyasah Perspective.” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*

2, no. 2 (September 2020): 345–62. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v2i2.167>.

Uhad Afras Ilzamil, Al Fath Sahru Ramadhan, Abdul Hamid Safar, Ahmad Raja Samudra, and Zamzamil Aufa. “Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2025): 15–24.

Wardana, Dodi Jaya, and Radian Salman. “Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66–77.

Wele, Yabes Abraham Hau, Yosef Mario Monteiro, and Rafael Rape Tupen. “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 102–15. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.53s>.

Yulisman and Silm Oktapani. “Analisis Ilmu Perundang-Undangan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 2 (December 2024): 154–67. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489>.

Zulfian Achmad Noviandi, Hafija Safarina, and Muhammad Rizaldy Firdaus. “Penafsiran QS Ali Imran: 159 Dan Asy-Syura: 38 Tentang Musyawarah Dan Sistem Pengambilan.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 4 (2025): 713–19.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, 9 (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. LN.2011/No. 82, 51 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. LN.2022/No.143, 13 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.

Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pub. L. No. LN 2024 (225), 5 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304396/uu-no-61-tahun-2024>.

Sumber Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 83 (2012).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_79%20PUU%202011-%20TELAH%20BACA%205-6-2012.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 448 (2021).
<https://jdih.kemnaker.go.id/putusan/detail/114/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91-tahun-2020>.

Sumber Data Elektronik

Ady Thea DA. “6 Poin Penting Perubahan Dalam UU Kementerian Negara.” *Hukum Online* (Jakarta), September 19, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-penting-perubahan-dalam-uu-kementerian-negara-lt66ebe5a678cd4/>.

Bagus Ahmad Rizaldi. “Baleg Mulai Kaji Usulan Jumlah Kementerian Dalam RUU Kementerian.” *ANTARA* (Jakarta), Mei 2024.
<https://www.antaraneews.com/berita/4102983/baleg-mulai-kaji-usulan-jumlah-kementerian-dalam-ruu-kementerian>.

———. “DPR Setujui Badan Legislasi Mulai Bahas RUU Kementerian Negara.” *ANTARA* (Jakarta), September 3, 2024.
<https://www.antaraneews.com/berita/4304359/dpr-setujui-badan-legislasi-mulai-bahas-ruu-kementerian-negara>.

———. “RUU Kementerian Negara Disetujui Baleg DPR Untuk Dibawa Ke Paripurna.” *ANTARA* (Jakarta), September 9, 2024.
<https://www.antaraneews.com/berita/4320547/ruu-kementerian-negara-disetujui-baleg-dpr-untuk-dibawa-ke-paripurna>.

BBC News Indonesia. “DPR Sahkan RUU Kementerian Negara Menjadi UU Buka Jalan Bagi ‘Kabinet Jumbo’ Prabowo.” *BBC News Indonesia*, September 19, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qgq53e18ro>.

Farizy Adhy Rachman. “DPR Sepakati RUU Kementerian Negara, Menteri PANRB: Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.” *InfoPublik* (Medan), September 11, 2024. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/868750/dpr-sepakati-ruu-kementerian-negara-menteri-panrb-kolaborasi-penguatan-tata-kelola-pemerintahan>.

Fraksi Gerindra. “Baleg Sepakati RUU Kementerian Negara Dan RUU Keimigrasian Jadi RUU Inisiatif DPR.” *Fraksigerindra.Id* (Jakarta), Mei 2024. <https://www.fraksigerindra.id/baleg-sepakati-ruu-kementerian-negara-dan-ruu-keimigrasian-jadi-ruu-inisiatif-dpr/>.

- Melalusa Susthira Khalida. "Paripurna Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR." *ANTARA* (Jakarta), 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4124544/paripurna-setujui-revisi-uu-kementerian-negara-jadi-usul-inisiatif-dpr>.
- Nicholas Ryan Aditya. "Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara Sebagai RUU Kumulatif Terbuka." *Kompas.Com* (Jakarta), Mei 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/14/19103961/baleg-ajukan-revisi-uu-kementerian-negara-sebagai-ruu-kumulatif-terbuka>.
- Vico. "UU 61/2024: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *JDIH Kemenko Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan* (Jakarta), Oktober 2024. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/berita/uu-612024-perubahan-atas-undang-undang-nomor-39-tahun-2008-tentang-kementerian-negara#>.
- Willy Medi Christian Nababan, Nikolaus Harbowo, and Kurnia Yunita Rahayu. "DPR Buka Peluang Tambah Kementerian." *Kompas.Id* (Jakarta), 2024. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-buka-peluang-tambah-kementerian>.
- Willy Medi Christian Nababan and Susana Rita Kumalasanti. "Kubu Pro Dan Kontra Revisi UU Kementerian Negara Terlihat, Pembahasan Berlanjut." *Kompas.Id* (Jakarta), Mei 2024. <https://www.kompas.id/artikel/kubu-pro-dan-kontra-revisi-uu-kementerian-negara-terlihat-pembahasan-berlanjut>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A